

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2008

# APPBI dan Aprindo Tolak Genset

[JAKARTA] Kendati sepat untuk menghemat pemakaian listrik hingga minimal 10 persen, PT Perusahaan Listrik Negara (persero) tetap mewajibkan sektor bisnis, di antaranya mal, restoran, hotel, dan perkantoran, untuk menggunakan genset sebagai pengalihan beban listrik PLN.

Aturan itu diterbitkan PLN lewat Surat Edaran Nomor 02233/070/DITJB/2008 tentang Pengurangan Beban Pelanggan Bisnis dan Industri. Dalam surat tersebut ditegaskan, pelanggan B-3 (sektor bisnis) wajib menggunakan genset pada hari kerja, lima jam dalam satu hari, selama dua kali dalam satu minggu.

Penggunaan genset pukul 17-22 bagi hotel dan mal yang beroperasi mulai pukul 07-22. Sementara itu, penggunaan genset pukul 13-18 bagi perkantoran dan pusat belanja yang beroperasi pukul 07-18.

"Kami minta surat edaran ini dicabut. Sebab, kami tidak menyanggapi beban biaya yang timbul akibat penggunaan genset dua kali dalam satu minggu. Apalagi penggunaan genset pada waktu beban puncak itu *kan* biayanya tidak terhingga," kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) A Stephanus Ridwan ditemui *SP* di Jakarta, Selasa (19/8).

Padahal, sambung Ridwan, sebelumnya kami (pu-

mbauan PLN untuk menghemat pemakaian listrik 10-20 persen dengan mengurangi jam operasi eskalator dan suhu temperatur udara (*air conditioner/AC*).

"Sekarang begini, kalau tujuan berhemat minimal 10 persen tidak tercapai, dan kami tetap diwajibkan menggunakan genset itu baru tidak apa-apa. Tetapi, yang terjadi sekarang justru, diminta berhemat sekaligus wajib menggunakan genset. Jelas kami tidak setuju, kami minta surat ini dibatalkan," tegasnya.

Selain itu, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan paling sedikit Rp 100 juta untuk penggunaan satu genset selama lima jam operasi dengan kapasitas 1.250 kVA per unit genset per bulan.

"Biaya ini siapa yang mau menanggung? Bagaimana kalau ada yang menggunakan genset lebih dari satu, berarti beban biaya yang mereka tanggung lebih banyak. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki genset tidak harus mengeluarkan biaya tambahan. Ini *kan* tidak adil," ujar Ridwan.

## Mengkhawatirkan

Hal senada diungkapkan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Benjamin Mailool. Menurut dia, kendati dampak yang dirasakan pengusaha ritel itu tidak sebesar yang dirasakan pengelola pusat belan-

ja, tetap saja kewajiban penggunaan genset mengkhawatirkan peritel, sebagai kelompok penyewa gedung.

"Aturan ini lebih berdampak pada APPBI, tetapi ujung-ujungnya kami (Aprindo) juga yang akan kena. Kami khawatir, APPBI tidak mampu menyediakan pasokan listrik dengan genset. Kalau pun mampu, mereka akan membebaskan biaya tambahan itu kepada kami," tutur dia.

Padahal, Benjamin melanjutkan, 50 persen dari *service charge* yang dibayarkan peritel kepada pengelola gedung merupakan pemakaian listrik. Oleh karena itu, dia khawatir jika penggunaan genset diteruskan, beban biaya yang ditanggung peritel akan sangat tinggi. Sementara itu, terkait SKB sektor bisnis, Direktur Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Gunaryo menuturkan, saat ini, pemerintah masih berupaya memfasilitasi keluhan dari para pengusaha sektor bisnis.

"Saya minta SKB dibuat dengan data yang lengkap, sebab PLN dinilai belum siap. Saya akan menulis ulang konsep ini karena ada beberapa masukan, namun demikian memang ada beberapa poin yang telah disepakati, kecuali penggunaan genset. Opsi menggunakan genset ini di luar SKB, dan itu yang dike-

luhan asosiasi. Seharusnya, opsi tersebut ditempuh dengan cara *business to business* (B2B)," kata Gunaryo.

Dia menambahkan, rapat pembahasan tersebut belum keputusan final rancangan SKB hemat listrik bagi sektor bisnis, karena perwakilan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tidak hadir.

"Kami masih harus mendengar masukan dari PHRI. Hari ini (kemarin) mereka tidak hadir, padahal konsumsi listrik mereka paling besar. Rapat ini belum final, ini masih penyisihan," ujarnya.

Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar menegaskan, mereka (sektor bisnis) sudah kami jadwalkan untuk tidak menggunakan listrik PLN dahulu pada saat tertentu. Apabila sampai tidak dilakukan dan terjadi kelebihan beban puncak, maka mereka menjadi prioritas yang akan dipadamkan.

Direktur Jawa Bali PLN Murtaqi Syamsudin menjamin apabila sektor bisnis menggunakan genset maka tidak akan ada pemadaman mendadak. "Itu kompensasi atau insentif yang bisa kami berikan," ujarnya.

Dilanjutkannya, PLN sudah mulai melakukan sosialisasi dan beberapa pengusaha bersedia menjalankan surat edaran PLN tersebut. Namun, ia tidak menyebut jumlahnya. [CNV/DLS/M-6]

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST																																												
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEP</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 16												TAHUN 2008																																	

## Pelanggan 6.600 VA Tidak Berhemat

[JAKARTA] Meskipun pelaksanaan tarif multiguna (nonsubsidi) untuk pelanggan R3 (di atas 6.600 VA) telah berlangsung 4 bulan, tidak ada tanda-tanda penghematan yang dilakukan oleh pelanggan rumah mewah tersebut.

"Tidak ada kepekaan dari mereka dengan kenaikan harga jual melalui pelaksanaan tarif nonsubsidi. Mereka masih mampu membayar dan tidak memiliki masalah keuangan," ujar Direktur Jawa Bali PLN, Murtaqi Syamsudin di Jakarta, Selasa (19/8).

Pembayaran tarif listrik nonsubsidi dikenakan kepada pelanggan 6.600 VA yang

tidak melakukan penghematan sekitar 20 persen dari pemakaian normalnya. Total pelanggan sebanyak 610.000 pelanggan.

Pelanggan yang melebihi batas hemat dikenakan tarif nonsubsidi senilai Rp 1.380 per Kwh, lima puluh persen lebih tinggi dari tarif bersubsidi Rp 560 per Kwh.

Saat ini, lanjut Murtaqi, PLN fokus pada penghematan listrik melalui pengaturan beban di sektor bisnis dan industri. Prinsipnya PLN giat melakukan pengendalian beban puncak.

Hingga kini evaluasi pelaksanaan pergeseran hari kerja di sektor industri ke

Sabtu-Minggu sudah memasuki minggu ketiga. Penghematan yang diperoleh rata-rata sebesar 180 MW.

Khusus industri padat karya, Murtaqi menjelaskan akan menjadi prioritas terakhir pelaksanaan penghematan listrik yang mewajibkan industri 7 hari kerja menggunakan genset sehari dalam sebulan.

"Pembahasan dan sosialisasi masih berjalan di lapangan. Kami fokus pada sektor industri yang dapat melakukan pergeseran hari kerja, kita lihat dulu hasilnya," ujarnya.

Diutarakan Murtaqi, pada dasarnya PLN membutuh-

kan penghematan daya. Diperkirakan menjelang Lebaran dan akhir tahun akan terjadi kenaikan beban puncak. Kenaikan beban sekitar 400 MW (2,5 %) apabila tidak ada penghematan.

Hal itu terjadi dikarenakan banyak sektor industri menggenjot produksinya menjelang akhir tahun.

"Pengaturan kluster penggunaan genset akan diserahkan kepada unit-unit berdasarakan negosiasi dengan industri 7 hari kerja. Apakah menggunakan genset dua jam sehari atau seharian itu tergantung pembahasan *business to business* dengan pengusaha," katanya. [DLS/M-6]

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE:  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI  
 GEOLOGI

- UMUM  
 PANSUS ANGKET

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 14

TAHUN 2008



SH/Don Peter

**HEMAT LISTRIK**-Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (19/8), menyusul adanya permintaan dari PLN agar pengelola pusat perbelanjaan, hotel, perkantoran, dan tempat hiburan menghemat listrik. Krisis listrik diperkirakan akan berlangsung sampai tahun 2009.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 14

TAHUN 2008

### Jelang Puasa Beban Listrik Naik 4,5 Persen

■ **JAKARTA**-Beban puncak listrik Jawa-Bali diperkirakan mengalami kenaikan hingga 2,5 persen atau sekitar 400 megawatt memasuki Bulan Puasa mendatang dan menjelang Lebaran. Direktur Pembangkit Jawa Madura Bali PLN Murtaqi Syamsuddin menjelaskan kenaikan tersebut disebabkan berubahnya pola penggunaan listrik oleh masyarakat dan sektor industri.

Menurut Murtaqi, menjelang Lebaran, sektor industri akan lebih gencar menggenjot produksi yang menyebabkan bertambahnya beban puncak.

Murtaqi mengaku khawatir jika kenaikan produksi dan beban puncak tidak mampu ditopang dengan adanya cadangan listrik yang cukup. Penghematan yang dilakukan selama ini di sektor industri baru mencapai 180 megawatt. Sedangkan penghematan di mal, perkantoran, dan hotel yang akan dimulai 25 Agustus mendatang ditargetkan bisa mencapai 200 megawatt. Padahal, cadangan aman yang diperlukan sistem Jawa-Bali sebesar 600 megawatt.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menambahkan, pihaknya sudah menjadwalkan klaster-klaster industri dan bisnis yang harus mengalihkan penggunaan listrik PLN ke genset. (dwi)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 141

TAHUN 2008

## ■ Terkait Kewajiban Memakai Genset

# Pengelola Mal Akan Tuntut PLN

Jakarta-Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia siap menggugat PT PLN jika tetap memberlakukan ketentuan pemakaian genset dalam rangka penghematan listrik.

Oleh  
**NAOMI SIAGIAN**

Penggunaan genset hanya sebagai bentuk pemaksaan yang sangat merugikan pengusaha ritel.

"Kami meminta agar kewajiban pemakaian genset dicabut. Kalau tetap diberlakukan, kami sudah menyiapkan tim pengacara untuk menuntut PLN," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan, Selasa (19/8).

Hal itu dikemukakan Stefanus terkait surat Direktur Jawa Madura Bali PT PLN Murtaqi Syamsudin tentang pengurangan beban pelanggan bisnis dan industri pada 11 Agustus 2008. Dalam surat yang ditujukan pada General Manager PLN Distribusi Jawa Bali tertulis PLN mewajibkan pengurangan beban bagi pelanggan B-3, I-3 dan I-4.

Pelanggan B-3 wajib menggunakan genset pada hari kerja, dua kali seminggu selama lima jam sehari, dengan ketentuan pertama pukul 17.00-22.00 (WBP) bagi

pelanggan B-3 Hotel dan B-3 Mal yang beroperasi mulai pukul 07.00-22.00. Kedua, pukul 13.00-18.00 (LWBP) bagi pelanggan B-3 Perkantoran Swasta dan Pusat Belanja yang beroperasi mulai pukul 07.00-18.00 WIB. Kebijakan tersebut berlaku mulai 25 Agustus 2008. Pelanggan yang melanggar ketentuan ini diberi sanksi pemutusan listrik saat terjadi kekurangan pasokan pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Stefanus menegaskan pada prinsipnya pihaknya bersedia dan mendukung program penghematan listrik minimal 10 persen. Rencana penerbitan SKB penghematan listrik untuk mal dan hotel juga disetujui kecuali penghematan yang disertai pemaksaan menggunakan genset.

"Biaya listrik yang harus dibayar terlalu mahal. Untuk satu genset kita akan menambah biaya Rp 100 juta dengan pemakaian selama lima jam, dengan daya 1.250 KVA. Semakin banyak genset yang digunakan dalam satu gedung akan semakin besar kerugiannya. Siapa yang mau bayar

tagihan ratusan juta sampai miliar?" kata Stefanus.

Dia menegaskan kesulitan terbesar akan dialami oleh mal atau pusat belanja yang para penyewanya adalah pedagang kecil seperti ITC. Sebab tagihan listrik pada akhirnya akan dibayar oleh penyewa, yang merupakan pedagang-pedagang kecil.

"Penghematan akhirnya tidak memaksa harus pakai genset. Mau-nya apa, penghematan atau tidak? Kecuali pusat belanja tidak bisa melakukan penghematan 10 persen, memakai genset tidak masalah," tegas Stefanus. APPBI sudah mengajukan keberatan dua kali kepada PLN. Tetapi dikhawatirkan PLN akan mengulur-ulur waktu hingga penerapan pada 25 Agustus.

Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan Gunaryo juga tidak setuju pemakaian genset. Merfurutnya, kewajiban mal memakai genset diupayakan untuk dihindari masuk dalam SKB. Draft SKB masih disusun dan PLN diminta membuat kelengkapan data.

Gunaryo menilai pemakaian genset tidak wajar sebab pemakaian 110 pusat belanja yang ada di Jawa-Bali hanya lima persen dari total konsumsi listrik. Yang terbanyak justru di hotel dan perumahan. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: A2

TAHUN 2008

## Memaksa Mal Berhemat Listrik

Tak banyak cara mengatasi paceklik listrik di negeri ini. Langkah taktis Perusahaan Listrik Negara memaksa pelaku bisnis menggunakan genset dua kali seminggu untuk menekan konsumsi setrum, bagaimanapun, harus diterima. Tanpa terobosan ini, pemadaman bergilir bakal terus terjadi. Ujung-ujungnya, kita semua pula yang rugi.

Pengusaha mal, hotel, dan gedung perkantoran yang terkena kewajiban itu memang memperoleh beban tambahan. Mereka mesti menyediakan dan mengoperasikan genset selama lima jam dua kali seminggu mulai 25 Agustus mendatang. Jika mereka tidak melaksanakan aturan ini, PLN akan memberi sanksi pemutusan sambungan listrik. Padahal, menurut klaim sejumlah pengusaha, duit yang digelontorkan untuk memenuhi kewajiban ini mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Masalahnya, tak banyak pilihan lain. Upaya menghemat listrik yang sudah dilakukan masih jauh dari memadai. Kebijakan pemerintah sejak 1 Agustus lalu, yang mengharuskan sektor industri mengalihkan jam kerja di saat beban puncak pukul 17.00-22.00 ke Sabtu-Minggu, hanya menghasilkan pengurangan 180 megawatt. Padahal, pada jam sibuk itu, defisit listrik yang kerap terjadi mencapai 600 megawatt.

Dalam jangka pendek, tekor setrum ini mau tak mau harus diatasi lewat pemangkasan konsumsi lis-

trik. Pilihannya bisa lewat pemadaman bergilir, yang selama ini kerap dilakukan PLN, atau menekan penggunaan listrik oleh sektor usaha yang rakus energi, seperti industri dan bisnis.

Memilih pemadaman bergilir jelas bukan langkah bijaksana. Sebab, yang bakal terkena dampaknya sangat luas dan kebanyakan dari kalangan *wong cilik*, yang bukan penyebab utama terkurasnya cadangan listrik. Akan terasa lebih adil, memang, jika kebijakan pengirisan ini diterapkan buat mal dan hotel, tempat kaum berduit berbelanja dan menghabiskan malam. Toh, kebijakan ini tak akan membuat mal dan hotel bangkrut. Para pengusaha hendaknya mau sedikit "berkorban" demi kepentingan bersama.

Langkah PLN akan efektif jika pemerintah tak hanya berpangku tangan, dan memberi dukungan sekadarnya buat perusahaan setrum negara itu. Perlu segera disusun peraturan khusus yang memayunginya, seperti Surat Keputusan Bersama Lima Menteri yang mewajibkan kalangan industri mengalihkan sebagian jam kerjanya ke hari libur. Pemerintah pun harus bisa menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar genset, yang banyak dikhawatirkan oleh para pengusaha.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu segera menuntaskan pekerjaan rumahnya: melakukan audit pembangkit dan pembenahan internal seperti pernah disarankan koran ini sebelumnya. Dengan begitu, bisa diketahui pasti di mana letak kesalahan akut manajemen PLN dalam pengadaan, pengoperasian, dan perawatan pembangkit yang berujung pada krisis listrik sekarang. ●

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA

DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANKRET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A 4

TAHUN 2008

## Pelanggan Listrik Bisa Ajukan Gugatan Wanprestasi

**JAKARTA** — Kebijakan manajemen PLN memaksa kalangan pelanggan bisnis (perkantoran, hotel, dan pusat belanja) menggunakan genset dinilai melanggar kesepakatan jual-beli listrik. Ahli hukum kelistrikan Yunan Lubis menyatakan pelanggan bisnis bisa mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PLN. "Dasarnya adalah PLN tak mampu menyediakan pasokan listrik sesuai dengan kontrak yang disepa-

listrik dan tidak membayar tagihan. "Tidak ada ketentuan yang mewajibkan pelanggan menggunakan genset."

Menurut dia, pelanggan bisa melakukan gugatan wanprestasi terhadap PLN karena tak bisa memenuhi pasokan listrik sesuai dengan kontrak. "Gugatan bisa diajukan karena PLN tak memenuhi kontrak dan tuntutan ganti rugi akibat menggunakan genset," kata Sekretaris Jen-

deral Advokasi Konsumen Listrik Indonesia ini. Yunan menambahkan, gugatan yang dilakukan pelanggan bisnis bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar penyebab krisis listrik.

deral Advokasi Konsumen Listrik Indonesia ini. Yunan menambahkan, gugatan yang dilakukan pelanggan bisnis bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar penyebab krisis listrik.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wnandi menyatakan kebijakan PLN mewajibkan pelanggan bisnis menggunakan genset bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 ten-

gugatan wanprestasi terhadap PLN karena tak bisa memenuhi pasokan listrik sesuai dengan kontrak. "Gugatan bisa diajukan karena PLN tak memenuhi kontrak dan tuntutan ganti rugi akibat menggunakan genset," kata Sekretaris Jen-

deral Advokasi Konsumen Listrik Indonesia ini. Yunan menambahkan, gugatan yang dilakukan pelanggan bisnis bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar penyebab krisis listrik.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wnandi menyatakan kebijakan PLN mewajibkan pelanggan bisnis menggunakan genset bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. "Jika pengusaha membawa hal ini ke pengadilan tata usaha negara, PLN pasti kalah," ujarnya kepada *Tempo* kemarin.

Menurut dia, kebijakan PLN tersebut bukan kebijakan antarbisnis, "Melainkan monopoli PLN," katanya. Sofjan menjelaskan, kebijakan itu seharusnya dibahas secara bisnis dan ada kesepakatan kedua pihak. "Pengusaha tidak tahu, tiba-tiba

kati," ujarnya kepada *Tempo* kemarin.

Yunan menjelaskan, dalam kontrak jual-beli listrik disebutkan bahwa PLN akan menyediakan daya listrik yang diinginkan. "Pelanggan berkewajiban membayar tarif listrik sesuai dengan tagihan," katanya. Menurut dia, dalam kontrak juga disebutkan, pemutusan sambungan dilakukan jika pelanggan melakukan tindak kriminal atau mencuri

mendapat surat edaran," katanya.

Namun, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purwono mendukung kebijakan PLN. Dia mengatakan kebijakan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pemakaian genset sendiri oleh pelanggan bisnis berdasarkan kesepakatan bersama PLN dan pengusaha untuk menghindari pemadaman," katanya.

● ALI NUR YASIN | CORNILA DESYANA | AGUNG SEDAYU

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST																																												
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEP</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 118											TAHUN 2008																																		

# Bisnis Hotel Terancam Bangkrut

Pengusaha sudah menghemat penggunaan listrik.

**KARTASIA** — Bisnis perhotelan skala kecil terancam bangkrut akibat kebijakan PLN yang mewajibkan pengelola hotel menggunakan genset. Para pengusaha hotel kelas melati hingga bintang dua masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN.

Menurut Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Carla Parengkuan, jumlah hotel skala kecil lebih banyak ketimbang hotel bintang empat dan lima. Dia menjelaskan rasio hotel kecil dan besar 70 : 30.

Carla mengatakan pihaknya tidak dapat menolak kebijakan itu. "Tidak bisa ditawar lagi," ujarnya kemarin. Kebijakan PLN tersebut dipastikan akan menambah beban usaha dan mengakibatkan penutup-

an hotel.

Sebelumnya, PLN mewajibkan pelanggan bisnis (perkantoran, hotel, dan pusat belanja) menggunakan genset mulai 25 Agustus nanti. Penggunaan genset dilakukan selama lima jam sebanyak dua kali seminggu.

Pelanggan hotel dan pusat belanja diwajibkan menggunakan genset pada pukul 17.00-22.00 WIB. Sedangkan pelanggan perkantoran diwajibkan menggunakan genset pada pukul 13.00-18.00 WIB. Pelanggan yang menolak melaksanakan kebijakan itu akan dikenai sanksi pemutusan sambungan sementara.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yanti Sukamdani mengatakan pengelola hotel sudah menghemat pemakaian listrik secara optimal. "Apa lagi yang mau dihemat," ujarnya.

Menurut dia, kontribusi biaya

energi listrik terhadap total biaya usaha perhotelan mencapai 75 persen. "Tanpa disuruh pun kami pasti berhemat," kata Yanti. Pengelola hotel, ujar dia, sudah menghemat pemakaian listrik sejak 10 tahun lalu. Caranya dengan mematikan lift dan penyejuk udara ketika sudah larut malam.

Chief Executive Officer Senayan City Handaka Santosa mengatakan pengelola mal dan pusat belanja sudah menghemat pemakaian listrik. Penghematan yang dilakukan adalah mengurangi pemakaian listrik dan menaikkan suhu penyejuk udara dari 22 derajat Celsius menjadi 25 derajat Celsius. Menurut dia, penggunaan genset akan menaikkan biaya operasional dua kali lipat.

Handaka menyatakan seharusnya PLN meminta maaf kepada pelanggan bisnis karena tak mampu memasok listrik sesuai dengan kesepa-

katan. "Bukan sebaliknya, melakan pemadaman jika ada yang menolak menggunakan genset," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan nandi mengatakan kebijakan I mewajibkan penggunaan genset lakukan sepihak. "Pengusaha t tahu apa-apa, tiba-tiba mend surat edaran," katanya.

Pelaku bisnis, tutur Sofjan, keberatan menggunakan genset kali dalam satu pekan karena t adanya pasokan solar. "Tidak jaminan tersedianya solar yang kup untuk pemakaian selama jam," ujarnya. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak m liki koordinasi antarinstansi. "sing-masing pihak memiliki ker an yang berbeda dan jalan sen sendiri."

● ALI NY | HARUN MAHBUB | CORNILA DESYANA | AGUNG

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 09

TAHUN 2008

SKB JAM KERJA

## Ribuan Buruh Demo Tolak Listrik Biarpet

**SURABAYA (MI):** Sekitar 3.000 buruh dari berbagai perusahaan di Gresik, Jawa Timur, berunjuk rasa menuntut PT PLNagar tidak menerapkan pemadaman bergilir.

Aksi buruh itu dimulai di tiga titik wilayah. Di wilayah Gresik Selatan, buruh merangsek dari Kecamatan Wringin Anom dan Driyorejo. Di sektor utara, para buruh berkumpul di depan Pabrik Maspion Manyar dan di sektor Gresik Barat Kota, mereka berkumpul di Jalan Kapten Darmo Sugondo. Mereka kemudian menyatu bergerak ke Kantor PLN Gresik.

Para buruh melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan PT PLN yang telah melakukan pemadaman bergilir di wilayah Gresik yang berimbas ke

industri.

"Pemadaman bergilir sangat merugikan buruh, pendapatan buruh menjadi berkurang, kami tidak dapat uang lembur," kata koordinator aksi Suyitno, kemarin.

Mereka menuntut agar PT PLN membatalkan SKB lima menteri tersebut. Kebijakan pemadaman bergilir membuat buruh makin menderita. Hampir semua perusahaan di Gresik telah menerapkan SKB tersebut dengan mengubah jadwal kerja. Namun, perubahan itu justru merugikan buruh.

"Buruh sekarang banyak yang

menganggur, setelah kerja, biasanya lembur. Sekarang tidak bisa lagi. Ini jelas-jelas merugikan kami," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Diklat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Hariyanto mengatakan penerapan SKB Lima Menteri, yakni menggeser hari kerja bagi kalangan pelaku industri, diharapkan bisa ditinjau kembali.

"Setelah diberlakukan per 31 Juli lalu, penerapan SKB Lima Menteri ini tidak berjalan sesuai dengan harapan para pelaku industri."

Pemindahan hari kerjanya itu tidak didukung dengan pelayanan jasa yang lain. Misalkan, perbankan maupun jasa pemerintahan yang pada Sabtu dan Minggu tetap memilih tutup Akibatnya, proses produksi atau proses perizinan terhambat. Pada gilirannya, para pelaku industri tidak bisa bekerja secara optimal.

Setelah Magelang, PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Purwokerto, Jawa Tengah, yang meliputi Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas memastikan tidak akan melakukan pemadaman bergilir pada malam hari selama Ramadan. "Pemadaman hanya akan dilakukan pada siang hari," kata Asisten Manajer Pelayanan APJ Purwokerto Marsupriyanto.

(FL/LD/AA/N-3)

» 'Pemadaman bergilir sangat merugikan buruh, pendapatan buruh menjadi berkurang, kami tidak dapat uang lembur.'  
Suyitno, Koordinator Aksi Buruh

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 200

## Efisiensi PLN Jadi Prioritas

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menuntut BUMN untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang, termasuk penyediaan ketenagalistrikan. Untuk menepis anggapan tidak efisien itu, PT PLN (Persero) memaksimalkan peningkatan *eficiency drive programme (EDP)* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000.

Vice President Efisiensi dan Kinerja PLN Sarwono Hardjomuljadi mengatakan, selama ini EDP merupakan upaya untuk mengefisienkan pengeluaran operasi (*operational expenditure*) maupun pengeluaran modal atau investasi (*capital expenditure*). Salah satu langkah yang ditempuh dengan menggelar Forum Efisiensi Ketenagalistrikan Indonesia pada pertengahan Agustus lalu di Yogyakarta dengan mitra bisnis terhadap upaya efisiensi PLN.

"Langkah ini merupakan wujud upaya transparansi PLN ke publik. Sehingga PLN dapat semakin berupaya meningkatkan efisiensi dalam bidang-bidang yang dapat dikendalikan oleh PLN. Selain itu juga hal-hal lain yang memerlukan dukungan masyarakat dan mitra bisnis. Hal ini penting agar efisiensi menjadi tepat sasaran dan efektif serta tidak salah arah," kata Sarwono Hardjomuljadi.

Selain mendengarkan pandangan pemangku kepentingan PLN, dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh direksi PLN, direksi anak perusahaan

PLN, general manager unit-unit di lingkungan PLN serta perwakilan mitra bisnis mulai dari pemasok, kontraktor, hingga konsultan. Dalam Pakta Integritas ini, segenap jajaran PLN berjanji akan menerapkan delapan poin yang telah disepakati, di antaranya, berperilaku adil, jujur, dan terbuka. Selain itu harus selalu mematuhi UU dan peraturan yang berlaku, tidak melakukan praktik korupsi, melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* serta menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Terkait hal ini, Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, upaya efisiensi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan oleh PLN untuk mengurangi kerugian yang diderita selama ini. Berbagai upaya sudah dilakukan PLN untuk melakukan efisiensi, mulai dari hilir maupun hulu. Di hilir antara lain PLN memberlakukan tarif non-subsidi, pembagian lampu hemat energi (LHE), penghematan bersifat administratif, dan program *demand side management (DSM)*. Sedangkan di sisi hulu (melalui pembangkit), PLN berupaya mempercepat energy mix pada pembangkit listrik. Antara lain dengan mengalihkan penggunaan minyak jenis solar (*high speed diesel/HSD*) menjadi *marine fuel oil (MFO)*. Selain itu, juga mempercepat pasokan gas ke pembangkit listrik yang berbahan bakar HSD (gasi-

fikasi), penggunaan minyak kelapa sawit mentah (CPO-nisasi), dan diversifikasi pembangkit. "Kami sedang menggalakkan penghematan di tubuh PLN di berbagai unit, dalam rangka menuju efisiensi," kata Fahmi.

### Investasi

Sementara itu dari Surabaya dilaporkan, PLN membutuhkan dana hingga Rp 30 triliun untuk membangun kelistrikan dalam negeri yang membutuhkan pasokan sebanyak 3.000 MW per tahun. Tetapi PLN merasa masih perlu pengkajian kembali terkait peluang privatisasi untuk memenuhi kebutuhan dana yang ada. Pernyataan ini disampaikan Dirut PT PLN Persero Fahmi Mochtar usai membuka Rakernas Serikat Pekerja (SP) PT PLN di Surabaya, Rabu (20/8). "Privatisasi di bidang kelistrikan perlu dikaji kembali, baik secara ekonomi, politis, dan sosial agar tidak didefinisikan secara keliru dan berbeda maknanya seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 1985," tuturnya.

Menurut Fahmi, privatisasi hanya salah satu cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan tersebut. Di luar skema itu masih ada skema pengadaan dana, baik berupa pinjaman langsung, pinjaman melalui pemerintah, penerbitan obligasi atau menjual aset.

PLN, lanjut Fahmi Mochtar, sekarang sulit berinvestasi, apalagi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang

menjadikan PLN harus membayar lebih dari 110 dolar AS per barel. Konsekuensi dari itu, biaya untuk pengadaan BBM selama 2008 ini mencapai Rp 88 triliun atau jauh lebih besar dibanding total pendapatan BUMN ini yang hanya Rp 79 triliun. Sementara berbagai upaya pengalihan energi primer dari BBM ke bahan bakar jenis lain sudah dilakukan sejak 1997 lalu. Tapi krisis moneter menjadikan proyek pembangunan pembangkit itu ditunda atau dibatalkan sama sekali.

Sementara itu, Ketua Umum SP PT PLN Ahmad Daryoko menentang keras rencana penawaran saham perdana ke publik (*initial public offering/IPO*) anak-anak perusahaan PLN di bidang pembangkit. Misalnya seperti PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan PT Indonesia Power sebesar 30 persen. Menurut dia, upaya ini merupakan bentuk penjualan aset milik rakyat kepada kelompok orang tertentu. "Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001021022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 tentang ketenagalistrikan," tuturnya.

Dia menyatakan bahwa langkah penjualan aset negara melalui skema IPO merupakan privatisasi yang dilakukan secara pelan-pelan. Ini sama saja dengan menjual aset negara dengan cara mencuri-curi atau tidak terang-terangan setelah sebelumnya gagal.

(A Choir/Andira)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 200

## Pengalihan Jam Kerja Belum Berlaku Bagi Usaha Garmen

INDUSTRI garmen, sementara ini, patut bersyukur. Mereka belum akan terkena kewajiban pengalihan jam kerja ke Sabtu dan Minggu. Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang Penghematan Listrik untuk Industri ternyata menyatakan, industri garmen adalah industri terakhir yang terkena aturan pengalihan jam kerja.

Ansari Bukhari, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian mengatakan, penerapan SKB Lima Menteri untuk industri garmen baru berlaku setelah industri besar lain menerapkan peraturan itu. "Setelah berjalan semuanya, baru berlaku untuk garmen," katanya.

Ade Sudrajat, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menambahkan, alasan industri garmen masih dikecualikan dari SKB lima menteri ini karena industri tersebut termasuk padat karya. Selain itu, industri garmen juga hanya memakai energi listrik yang sangat kecil. "Untuk industri garmen besar saja pemakaian listriknya di bawah 120 kilo volt ampere (kVA)," tegasnya. Makanya, industri garmen baru akan memberlakukan aturan ini setelah SKB Lima Menteri berjalan sempurna.

Direktur Pemasaran PLN Jawa Bali Akhmad Taufik sebelumnya menyatakan, SKB Lima Menteri itu berlaku bagi industri yang memakai listrik di atas 200 KVA. Makanya, industri garmen baru terkena kewajiban pengalihan jam kerja kalau kebijakan itu berjalan optimal untuk industri besar. Fokus pengalihan jam kerja memang baru pada industri yang lahap energi.

Abdul Wahid Fauzie

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN: 26

TAHUN 2006



**Kebutuhan Energi**

Seorang mekanik mencari lempengan tembaga untuk keperluan servis dinamo di salah satu pasar onderdil di Jakarta, Rabu (20/8). Harga pasaran tembaga kian tinggi, seiring dengan makin meningkatnya krisis energi. Harga tembaga tahun ini sudah mendekati US\$ 9.000 per metrix ton, naik dibanding tahun 2006 yang masih US\$ 6.000 per metrix ton.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE:  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI  
 GEOLOGI

- UMUM  
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

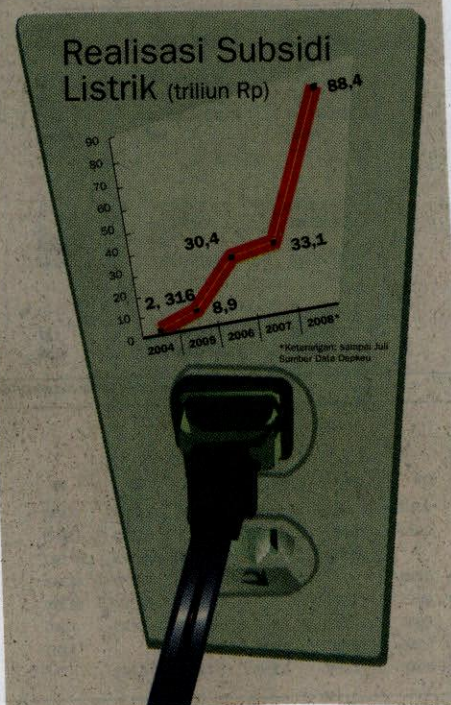
HALAMAN: 13

TAHUN 2008

**:: Indikator**

**Sudah *Byar Pet*,  
 Subsidi Pula**

**A**nggaran subsidi energi pada 2009 diprediksi berada pada kisaran Rp 291,2 triliun. Sekitar Rp 77,9 triliun dari angka itu adalah subsidi untuk listrik. Tentu saja, melonjaknya anggaran sebesar Rp 57,6 triliun dari estimasi awal itu benar-benar membuat banyak pihak terhenyak. wajar bila Menkeu, Sri Mulyani, menyatakan dengan angka sebesar itu, artinya selama ini tak banyak kemajuan dalam langkah penghematan. Sementara di sisi lain, kita tahu, listrik kita seringkali masih harus mati-hidup. Sudah mampet, dijjeruji pula. Sudah byar pet, disubsidi pula! ■



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 19

TAHUN 2008

# Cina Naikkan Tarif Listrik

## Tiga per empat listrik di Cina bergantung pada batu bara.

**BELJING** — Pemerintah Cina menaikkan tarif listrik untuk mengatasi tingginya biaya bahan bakar batu bara. Kenaikan tarif ini merupakan kedua kali dalam dua bulan terakhir. Hingga kini, pemerintah Cina terus berupaya memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk memenuhi ledakan pertumbuhan ekonomi negara itu.

Tiga perempat listrik Cina bergantung pada batu bara. Minimnya cadangan batu bara pada musim dingin lalu karena tersendatnya penerimaan persediaan akibat badai menyebabkan pemadaman listrik pada sejumlah wilayah. Selain itu, dalam lima tahun terakhir, Cina terus mengalami kekurangan listrik terutama saat musim panas berlangsung. Hal itu karena banyak pabrik, pusat perbelanjaan, dan mesin pendingin udara beroperasi mengkonsumsi listrik. Akibatnya, banyak wilayah di Cina mengalami pemadaman listrik.

Komisi Pengembangan dan

Reformasi Cina (NDRC) menyebutkan, tarif listrik *wholesale* akan meningkat sekitar lima persen. Harga tersebut sedikit lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya pada Juli lalu sekitar 4,7 persen. Keputusan badan perencanaan Cina menaikkan tarif listrik itu bertujuan untuk mengatasi tingginya biaya bahan bakar batu bara. Dengan demikian diharapkan kemungkinan kekurangan tenaga dan pemadaman tidak terjadi atau bisa diminimalisasikan.

Kenaikan tarif juga menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Cina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara itu. Sejumlah ekonom memprediksi, perekonomian negara tirai bambu itu akan tumbuh sedikitnya sembilan persen tahun ini.

Mengenai tarif listrik retail, NDRC menyatakan tidak akan menaikkannya. Untuk merealisasikan hal itu, NDRC akan mendorong BUMN Cina penyedia listrik, *State Grid Corp.*, untuk melindungi kepentingan pengguna listrik rumah tangga dan perusahaan.

Strategi serupa juga diterapkan Cina dalam menerapkan kenaikan harga minyak. Pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari ting-

ginya harga minyak dunia dengan tidak menaikkan harga bahan bakar retail. Namun, hal itu menyebabkan berbagai unit penyulingan minyak Cina mengalami kerugian besar.

Juli lalu, inflasi harga *wholesale* mengalami akselerasi menjadi 10 persen dan merupakan level tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Hal itu dipicu terus meningkatnya biaya energi dan bahan baku.

Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi *wholesale* terus mengalami peningkatan meski inflasi konsumen mengalami penurunan. Bahkan, sejumlah analis memprediksi, inflasi *wholesale* akan kembali mengalami peningkatan dalam beberapa bulan mendatang. Juni lalu, inflasi konsumen menurun menjadi 7,1 persen dari 8,7 persen pada Februari lalu.

Tahun ini, pemerintah Cina telah memperingatkan mengenai minimnya cadangan batu bara kepada sejumlah pembangkit listrik. Hal itu akibat tingginya penggunaan batu bara. Akibatnya, lebih dari 80 persen perusahaan pembangkit listrik negara itu kehilangan uang pada tujuh bulan pertama. Hingga akhir tahun ini, konsumsi batubara diproyeksi meningkat 11,5

persen menjadi 1,5 miliar ton.

## Harga minyak kembali naik

Sementara itu, pada Rabu (20/8) waktu setempat, harga minyak kembali mengalami kenaikan tipis. Hal itu dipicu aksi tunggu sejumlah investor atas laporan persediaan minyak AS. Penurunan persediaan dinilai sebagai indikator melambatnya ekonomi AS.

Harga minyak jenis *light sweet* untuk pengiriman September 2008 tercatat meningkat 55 sen menjadi 115,08 dolar AS per barel pada perdagangan elektronik New York Mercantile Exchange di Singapura. Sedangkan, nilai kontrak perdagangan *overnight* meningkat 1,66 dolar AS menjadi 114,53 dolar AS per barel.

Hingga kini, investor tengah menanti laporan mengenai cadangan minyak AS mingguan hingga 15 Agustus lalu dari Kantor Administrasi Informasi Departemen Energi AS. Laporan persediaan bahan bakar itu diprediksi bakal menunjukkan turunnya persediaan minyak sebanyak tiga juta barel. "Jadi, investor saat ini masih menanti jumlah persediaan minyak AS," kata Direktur *Hudson Capital Energy* wilayah Asia, Jonathan Kornafel. ■ aru/ap